Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)
Vol.2, No.1, 2022: 39-52

The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Level of Welfare of The Population in North Maluku Province

Insaf Santoso
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic that has hit Indonesia since March 2020 until now has had a fairly large impact. From a macro perspective, BPS reported that there was a contraction in economic growth, an increase in the number of poor people and unemployment resulting in a decline in the level of welfare of the population. North Maluku Province also experienced a similar problem, namely a decline in the level of population welfare as measured by per capita household expenditure. To identify the pattern of decline, descriptive statistical analysis is used based on Susenas panel data for the March-September 2020 period. The results of the analysis show that the COVID-19 pandemic has had an unfavorable impact on per capita expenditure. The characteristics of the households that are significantly affected are those who live in urban areas. In this region, the largest decline occurred in those with the status of informal workers and the elderly.

Keywords: covid-19 pandemic, population welfare, per capita expenditure, poverty

Corresponding Author: insaf@bps.go.id

Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Maluku Utara

Insaf Santoso
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

ABSTRAK: Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 hingga saat ini telah menimbulkan dampak yang cukup besar. Dari sisi makro, BPS melaporkan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Permasalahan serupa juga dialami oleh Provinsi Maluku Utara yaitu terjadi penurunan tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur dari pengeluaran per kapita rumah tangga. Untuk mengidentifikasi pola penurunannya maka digunakan analisis statistik deskiptif berdasarkan data Susenas panel periode Maret-September 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak kurang baik terhadap pengeluaran per kapita. Karakteristik rumah tangga yang terkena dampak cukup besar adalah mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Pada wilayah ini, penurunan terbesar terjadi pada mereka yang berstatus sebagai pekerja informal dan lansia.

Kata Kunci: pandemi covid-19, kesejahteraan penduduk, pengeluaran per kapita, kemiskinan

Submitted: 3 january; Revised: 16 january; Accepted: 26 january

Corresponding Author: insaf@bps.go.id

PENDAHULUAN

Saat ini, dunia sedang menghadapi permasalahan serius yang ditimbulkan oleh penyakit COVID-19. Sejak merebak pertama kali di Kota Wuhan, China, penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini semakin cepat dan masif ke seluruh dunia sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global. Menurut laporan *Worldmeter* pada tanggal 22 Agustus 2021, kasus COVID-19 ditemukan di 222 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 212.273.634. Di Indonesia, penyakit ini ditemukan pertama kali pada 02 Maret 2020. Jumlah kasus kemudian terus bertambah dengan cepat hingga mencapai 3.979.456 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 3.546.324 (89,1%) dan angka kematian mencapai 126.372 (3,2%) pada tanggal 22 Agustus 2021 (BNPB, 2021).

Terus bertambahnya jumlah kasus dengan tingkat kematian yang cukup tinggi menyebabkan Pemerintah Indonesia harus menerapkan beberapa kebijakan penting untuk menghambat laju pertambahan kasus. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan pemerintah pada tahun 2020 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar/Mikro (PSBB/M) dan adaptasi kebiasaan baru. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas penduduk di luar rumah seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (BNPB, 2020). PSBB/M diterapkan mulai April di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Maluku Utara.

BNPB melaporkan 1 kasus COVID-19 pertama untuk Maluku Utara pada 23 Maret 2020, jumlahnya tidak berubah sampai akhir Maret 2020. Namun, hal ini belum berpengaruh buruk terhadap indikator makro Maluku Utara karena memang PSBB/M pada bulan tersebut juga belum diterapkan. Sejumlah indikator makro Maluku Utara masih tercatat *on the track* pada triwulan I-2020. BPS (2020a) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada Triwulan I-2020 tumbuh sebesar 3,06 persen (y-o-y) dan angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,13 persen.

Dampak penerapan PSBB/M mulai terlihat nyata pada triwulan II-2020. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya perekonomian Maluku Utara. BPS (2020b) melaporkan bahwa perekonomian Maluku Utara pada triwulan II – 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,16 persen (y-o-y). Kontraksi cukup besar dirasakan pada sektor pendidikan, perdagangan, pariwisata, transportasi dan konsumsi rumah tangga. Sektor konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 3,59 persen (y-o-y). Melemahnya konsumsi rumah tangga ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Maluku Utara mengalami penurunan. Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis BPS, terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin pada Bulan September 2020 yaitu sebanyak 1.150 orang dari Maret 2020 (BPS, 2020c).

Menurut Dewi, dkk (2020), dampak pandemi COVID-19 tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menambah jumlah pengangguran terbuka yang disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang semakin meluas di sejumlah sektor. Dampaknya memang (Sarni & Sidaya, 2020) dirasakan pada beberapa lapangan usaha tertentu, pada status

pekerjaan tertentu, dan pada wilayah tertentu baik dilihat dari lokasi provinsi maupun lokasi kota-desa. Meningkatnya jumlah pengangguran sangat berpotensi menurunkan pengeluaran per kapita rumah tangga. Di sisi lain, Adieotomo dan Pardede (2021) menyatakan bahwa penduduk lanjut usia (lansia) termasuk paling rentan mengalami penurunan pendapatan sekaligus mengalami disebabkan pandemi COVID-19. Penurunan pendapatan juga berpotensi menurunkan pengeluaran per kapita. Berdasarkan dugaan tersebut, maka pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga di Maluku Utara dilihat dari aspek wilayah tempat tinggal, lapangan usaha, status pekerjaan, kelompok umur dan bagaimana cakupan bantuan sosial (bansos) yang diterima masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga

Menurut BPS (2020e), pengeluaran per kapita rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Lapangan Usaha

BPS (2020e) mendefinisikan lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) bekerja. Pada penelitian ini, lapangan usaha diklasifikasikan ke dalam 3 sektor yaitu sektor yaitu pertanian, manufaktur dan jasa. Sektor pertanian meliputi perkebunan, perikanan, peternakan, hortikultura, tanaman pangan, kehutanan dan jasa pertanian. Sektor manufaktur meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, dan konstruksi. Selanjutnya, sektor jasa meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

Status Pekerjaan

Menurut BPS (2020e), status pekerjaan adalah jenis kedudukan KRT/ART dalam pekerjaan utama. Terdapat 6 kategori status pekerjaan yang digunakan BPS yaitu berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; buruh/karyawan/ pegawai; pekerja bebas; dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Kelompok Umur

Untuk melakukan analisis data kependudukan, BPS (2020f) membagi umur penduduk ke dalam 3 kelompok umur yaitu kelompok umur muda yaitu berusia 0-14 tahun, kelompok umur produktif yaitu usia 15-64 tahun dan kelompok umur tua yaitu usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya, kelompok umur tersebut digunakan pada penelitian ini untuk melihat kelompok umur mana yang paling mengalami dampak dari pandemi COVID-19.

METODOLOGI

Data yang digunakan merupakan data mikro yang bersumber dari BPS Provinsi Maluku Utara melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dan Susenas September 2020. Kedua sumber data merupakan data panel rumah tangga, yaitu rumah tangga yang sama didata pada Maret dan September 2020. Penggunaan data panel bertujuan untuk mengetahui perubahan pola pengeluaran penduduk di masa pandemi ini. Adapun variabel yang digunakan untuk analisis adalah pengeluaran per kapita rumah tangga, wilayah daerah tempat tinggal, lapangan pekerjaan utama penduduk berusia 15 tahun ke atas, status pekerjaan penduduk berusia 15 tahun ke atas, kelompok umur penduduk dan penerimaan bantuan sosial yang diterima rumah tangga. Selanjutnya, seluruh variabel tersebut dianalisis dengan Metode Analisis Deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga

Pengeluaran per kapita merupakan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ukuran ini dapat merepresentasikan kondisi ekonomi individu maupun rumah tangga sehingga sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan penduduk atau rumah tangga. Kondisi perubahan pengeluaran per kapita di Maluku Utara selama pandemi COVID-19 dapat dilihat pada Gambar 1.

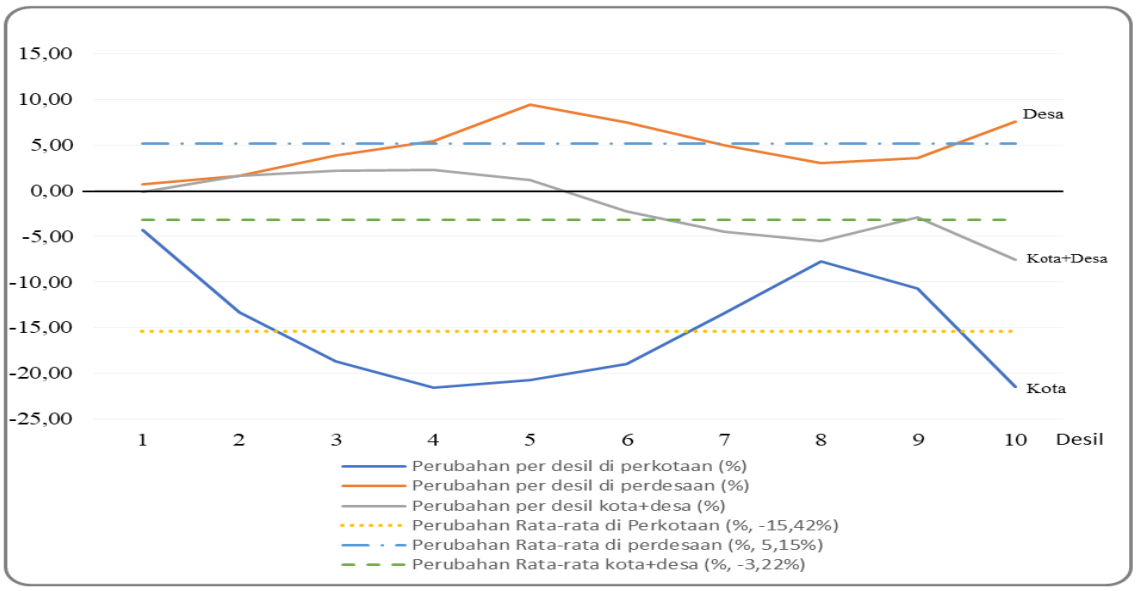

Gambar 1. Perubahan Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga Di Maluku Utara Selama Pandemi COVID-19 (Persen), Maret – September 2020

Secara umum, rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga di Maluku Utara pada periode Maret-September 2020 mengalami penurunan sebesar 3,22 persen. Penurunan terbesar terjadi di wilayah perkotaan yaitu 15,42 persen, sebaliknya di wilayah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 5,15 persen. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, penduduk menengah ke atas terutama pada desil enam hingga sepuluh yang paling terdampak COVID-19, penurunannya sekitar 2,31 persen hingga 7,62 persen.

Penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan paling merasakan dampaknya. Seluruh elemen masyarakat mulai dari 10 persen terbawah hingga 10 persen teratas mengalami penurunan pengeluaran. Penurunan paling dalam terjadi pada kelompok 40 persen terbawah dan 10 persen teratas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa COVID-19 tidak hanya berdampak pada masyarakat kecil tetapi masyarakat terkaya pun merasakan dampak yang cukup besar. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat di wilayah perdesaan, mulai dari 10 persen terbawah hingga 10 persen teratas tidak merasakan dampak COVID-19 dari sisi pengeluaran per kapita. Secara rata-rata, penduduk pada kelompok 10 persen terbawah mengalami peningkatan namun tidak besar yaitu hanya 0,69 persen, sementara pada kelompok 10 persen teratas mengalami peningkatan cukup besar yaitu 7,51 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada kelompok penduduk berpengeluaran menengah yaitu pada desil lima dengan capaian sebesar 9,41 persen.

Tidak terdampaknya pegeluaran per kapita di wilayah perdesaan dirasa cukup wajar karena struktur tenaga kerja di wilayah perdesaan didominasi oleh sektor pertanian. BPS (2020d) melaporkan pada Agustus 2020, jumlah tenaga kerja usia 15 tahun ke atas di wilayah perdesaan yang terserap pada sektor pertanian mencapai 221.223 orang (54, 72%). Pada sektor ini, PHK tenaga kerja relatif kecil sehingga tidak memengaruhi struktur pendapatan yang diterima tenaga kerja. Selain itu, struktur perekonomian Maluku Utara juga masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 22,16 persen pada Triwulan II 2020 (BPS, 2020b). Keadaan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran per kapita di wilayah perdesaan relatif tidak terdampak pandemi COVID-19.

Di perkotaan, dampak pandemi COVID-19 terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga dirasakan begitu nyata. Menurunnnya pengeluaran per kapita diduga karena menurunnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga pada semua sektor. Melihat struktur tenaga kerja di perkotaan yang didominasi oleh sektor manfukatur dan jasa maka gelombang PHK pun diduga terjadi pada kedua sektor ini. BPS (2020d) melaporkan bahwa selama periode Februari-Agustus 2020, terjadi penambahan jumlah pengangguran sebanyak 6.600 orang.

Pengeluaran per Kapita menurut Lapangan Usaha

Jika diklasifikasikan ke dalam 3 sektor, maka struktur perkekonomian Maluku Utara berdasarkan laporan BPS (2020b) pada triwulan II-2020 berturut-turut didominasi oleh sektor manufaktur (48,18 persen), sektor jasa (29,67 persen) dan sektor pertanian (22,16 persen). Namun, dari sisi ketenagakerjaan (BPS, 2020d), struktur tenaga kerja di Maluku Utara didominasi oleh sektor pertanian (45,93 persen), sektor manufaktur (31,67 persen) dan sektor jasa (22,40

persen). Berdasarkan klasifikasi ini, maka rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga juga akan diklasifikasikan ke dalam 3 sektor untuk menangkap fenomena yang terjadi pada penduduk yang bekerja di ketiga sektor selama pandemi COVID-19 tahun 2020.

Pada tabel 1, terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita rumah tangga pada ketiga sektor menunjukkan penurunan. Sektor manufaktur menunjukkan penurunan yang paling besar yaitu sekitar 9,49 persen disusul sektor jasa (1,42 persen) dan sektor pertanian (0,45 persen). Secara umum, pandemi COVID-19 tidak begitu dirasakan oleh penduduk pada golongan 40 persen terbawah khususnya pada sektor manufaktur dan jasa. Hal ini terlihat dari meningkatnya pengeluaran per kapita pada kuantil 1 dan kuantil 2. Sementara pada kelompok menengah ke atas (kuantil 3 sampai kuantil 5), dampak pandemi COVID-19 terlihat begitu nyata. Penurunannya berkisar 1,40 persen hingga 6,40 persen pada sektor manufaktur, dan penurunan pada sektor jasa mencapai 2,52 persen hingga 6,13 persen. Sementara pada sektor pertanian, penduduk yang termasuk ke dalam 20 persen terbawah juga ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari menurunnya pengeluaran per kapita yang mencapai 3,23 persen. Pada kelompok 20% teratas, penurunannya cukup tinggi yaitu sebesar 15,53 persen.

Tabel 1. Perubahan Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga Di Maluku Utara Menurut Tipe Wilayah, Kuantil, Dan Lapangan Pekerjaan Utama (Persen), Maret-September 2020

Tipe Wilayah	Kuantil	Pertanian	Manufaktur	Jasa
Perkotaan	1	-0,51	-12,46	-8,51
	2	-23,71	-18,72	-18,69
	3	-15,71	-18,38	-22,34
	4	-13,02	-12,87	-8,15
	5	-29,86	-8,27	-30,46
	rata-rata	-26,38	-21,57	-16,74
Perdesaan	1	-2,21	7,64	14,10
	2	5,13	5,03	7,80
	3	8,70	9,02	8,65
	4	4,76	3,94	5,17
	5	-0,38	2,90	19,67
	rata-rata	2,10	4,40	17,55
Perkotaan + Perdesaan	1	-3,23	5,95	5,32
	2	2,28	1,04	1,25
	3	0,79	-1,40	-2,52
	4	-4,77	-4,30	-5,94
	5	-15,53	-6,40	-6,13
	rata-rata	-0,45	-9,49	-1,42

Jika dipandang dari sisi wilayah, maka dampak terbesar memang berada di wilayah perkotaan. Seluruh sektor menunjukkan penurunan yang cukup

besar yaitu 26,38 persen pada sektor pertanian, 21,57 persen pada sektor manufaktur dan 16,74 persen pada sektor jasa. Salah satu faktor penyebab cukup besarnya penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga di perkotaan adalah menurunnya pendapatan rumah tangga pada ketiga sektor. BPS (2020d) melaporkan bahwa sebanyak 42,4 ribu orang di wilayah perkotaan yang menjadi penganggur, mengalami pengurangan jam kerja, menunda kegiatan usaha/sementara tidak bekerja, dan menjadi bukan angkatan kerja. Kondisi ini menyebabkan pendapatan rumah tangga pada ketiga sektor mengalami penurunan, sehingga rumah tangga akan mengontrol pengeluarannya. Potret selanjutnya dijelaskan oleh Sarni dan Hidayat (2020) bahwa penurunan pendapatan pada sektor pertanian di perkotaan disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan sulitnya pemasaran produk-produk pertanian di masa penerapan PSBB/M.

Berbeda dengan wilayah perkotaan, di wilayah perdesaan, dampak COVID-19 terhadap pengeluaran per kapita hanya dirasakan pada kelompok penduduk 20 persen terbawah dan 20 persen teratas khususnya pada sektor pertanian. Pada kedua kelompok penduduk tersebut, penurunannya masing-masing sebesar 2,21 persen dan 0,38 persen. Sementara pada sektor manufaktur dan jasa, masing-masing mengalami peningkatan pengeluaran per kapita.

Pengeluaran per Kapita menurut Status Pekerjaan

Jika dilihat dari sisi status tenaga kerja, maka idealnya penduduk yang berstatus sebagai pekerja informal yaitu mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga yang paling merasakan dampak pandemi COVID-19. Apakah ini juga berlaku di Maluku Utara? Gambar 2 memperlihatkan pengeluaran per kapita menurut status pekerjaan. Pada gambar terlihat bahwa penduduk yang berstatus sebagai pekerja informal terdampak paling besar dibandingkan dengan pekerja formal yaitu 6,09 persen berbanding 3,43 persen. Penurunan pengeluaran per kapita pada pekerja informal paling dirasakan pada kelompok penduduk 20 persen terbawah (kuantil 1) dan menengah ke atas (kuantil 4 dan 5). Penurunan pengeluaran per kapita pada pekerja formal juga dirasakan pada kelompok menengah ke atas (kuantil 3 sampai kuantil 5). Pada kelompok penduduk berpengeluaran rendah khususnya pada kuantil 2 juga terkena dampak namun relatif kecil penurunannya yaitu 0,57 persen.

Jika dibandingkan wilayah perkotaan dengan perdesaan, maka dampak yang ditimbulkan cukup berbeda. Pada wilayah perkotaan, baik pekerja formal maupun informal mengalami dampak yang luar biasa dengan rata-rata penurunan yang tidak jauh berbeda yaitu sekitar 18 persen. Seluruh elemen masyarakat mulai dari kelompok terbawah hingga teratas mengalami dampak yang cukup besar kecuali pada kelompok 20 persen teratas khususnya pada pekerja informal. Pada kelompok ini, pengeluaran per kapita mengalami peningkatan cukup besar yaitu 15,84 persen. Sebaliknya, di wilayah perdesaan, secara rata-rata tidak terjadi penurunan pengeluaran per kapita pada kedua status pekerjaan. Namun, jika dilihat lebih jauh menurut kelompok pengeluaran,

tampak bahwa pada kelompok penduduk 20 terbawah dan 20 persen teratas mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,95 persen dan 4,81 persen.

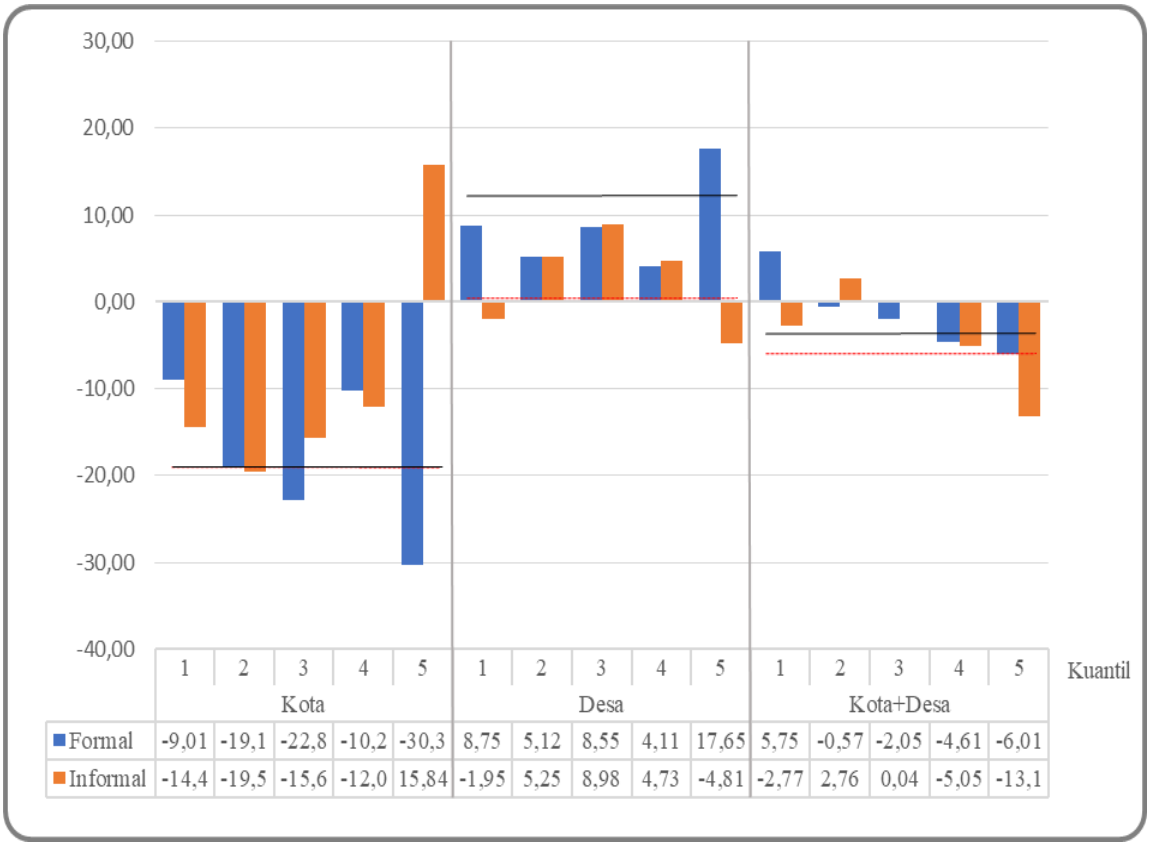

Gambar 2. Perubahan Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga Di Maluku Utara Menurut Status Pekerjaan Selama Pandemi COVID-19 (Persen), Maret – September 2020

Pengeluaran per Kapita menurut Kelompok Umur

Menurut Adioetomo dan Pardede (2021), di masa pandemi ini, khususnya pada kelompok lansia (usia 65 tahun ke atas) sangat rentan terhadap penurunan pendapatan terutama di wilayah perdesaan. Apabila pendapatan diproksi dari pengeluaran per kapita, apakah terjadi penurunan pengeluaran pada kelompok lansia di Maluku Utara? Tabel 2 di bawah ini akan menjelaskan pola pengeluaran per kapita penduduk lansia.

Pada tabel 2, terlihat bahwa selama selama periode Maret-September 2020, pengeluaran per kapita pada semua kelompok umur mengalami penurunan, namun penurunan cukup besar terdapat pada kelompok lansia yaitu sebesar 10,83 persen. Umumnya, kelompok penduduk menengah ke atas pada semua kelompok umur yang paling terdampak. Hal ini dapat dilihat dari penurunan pengeluaran per kapita pada kelompok tersebut.

Pada wilayah perkotaan, seluruh kelompok usia mengalami penurunan pengeluaran per kapita yang cukup besar, namun penurunan terbesar terdapat pada lansia dengan rata-rata penurunan sebesar 31,64 persen. Untuk wilayah perdesaan, penurunan pengeluaran per kapita hanya lansia pada kelompok penduduk 20 persen terbawah yaitu 0,45 persen. Keadaan ini menunjukkan

bahwa di Maluku Utara, pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada lansia yang tinggal wilayah perkotaan.

Tabel 2. Perubahan Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga Di Maluku Utara Menurut Tipe Wilayah, Kuantil, Dan Kelompok Umur (Persen), Maret-September 2020

Tipe Wilayah	Kuantil	Usia Muda (0-14 Tahun)	Usia Produktif (15-64 Tahun)	Usia Tua (65 Tahun Ke atas)
Perkotaan	1	-8,94	-10,77	-2,13
	2	-20,22	-19,88	-20,06
	3	-21,28	-19,99	-11,79
	4	-8,29	-13,07	-16,36
	5	-7,60	-22,07	-17,78
	rata-rata	-15,62	-14,97	-31,64
Perdesaan	1	2,11	0,63	-0,45
	2	3,97	5,21	2,54
	3	7,90	8,73	6,96
	4	3,75	3,89	7,05
	5	5,44	5,98	2,77
	rata-rata	3,50	5,26	2,13
Perkotaan + Perdesaan	1	2,84	-0,37	0,41
	2	2,59	2,00	3,90
	3	-1,65	-0,06	-3,56
	4	-5,85	-4,97	-4,22
	5	-0,75	-6,91	-17,62
	rata-rata	-3,41	-3,47	-10,83

Bantuan Sosial yang Diterima Selama Pandemi COVID-19

Sebagai konsekuensi dari penerapan PSBB/M agar melindungi kelompok-kelompok rentan, maka pemerintah pusat maupun daerah kemudian menyalurkan bansos kepada masyarakat di seluruh wilayah Indoensia, tidak terkecuali Maluku Utara. Skema bansos yang disalurkan pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19 melalui beberapa skema. Empat besar skema pemberian bantuan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) atau Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BLT Dana Desa.

Selain Pemerintah Pusat, skema bansos juga disalurkan oleh Pemerintah Daerah termasuk Maluku Utara. Bagaimana cakupan penerimaan bansos di Maluku Utara? Gambar 3 menggambarkan cakupan penerimaan Bantuan Sosial terkait penanganan COVID-19 yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Maluku Utara.

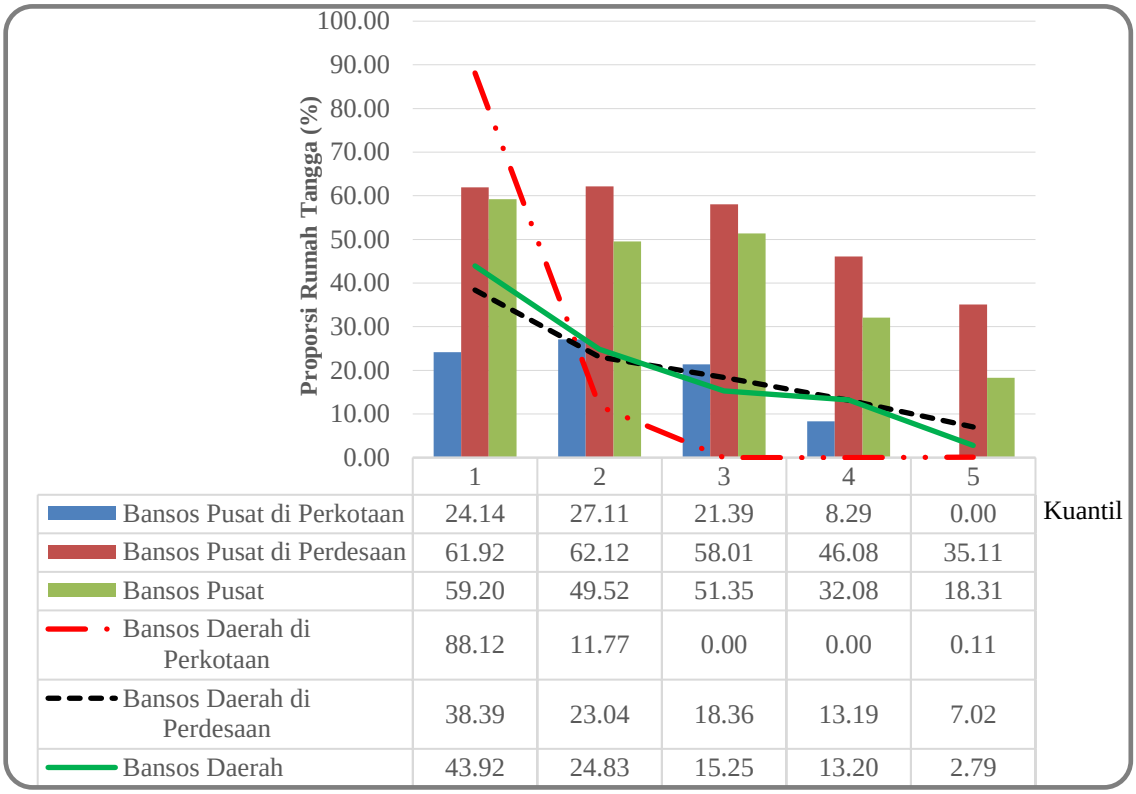

	1	2	3	4	5
Bansos Pusat di Perkotaan	24.14	27.11	21.39	8.29	0.00
Bansos Pusat di Perdesaan	61.92	62.12	58.01	46.08	35.11
Bansos Pusat	59.20	49.52	51.35	32.08	18.31
Bansos Daerah di Perkotaan	88.12	11.77	0.00	0.00	0.11
Bansos Daerah di Perdesaan	38.39	23.04	18.36	13.19	7.02
Bansos Daerah	43.92	24.83	15.25	13.20	2.79

Kuantil

Gambar 3. Cakupan Penerimaan Bantuan Sosial Di Maluku Utara Selama Pandemi COVID-19 (Persen), Maret – September 2020

Suatu rumah tangga dikatakan menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat apabila menerima salah satu dari bantuan PKH, BPNT/Program Sembako, BLT atau BLTDD. Di Maluku Utara, cakupan penerimaan bansos Pemerintah Pusat mencapai 42,10 persen. Di wilayah perkotaan, cakupan penerimaannya sebesar 16,15 persen dan di perdesaan mencapai 52,65 persen. Selanjutnya, cakupan bansos Pemerintah Daerah cukup kecil yaitu 5,35 persen. Di wilayah perkotaan, cakupannya hanya sebesar 1,59 persen dan di perdesaan mencapai 6,87 persen.

Pada Gambar 3, rumah tangga pada kelompok 20 persen terbawah (kuantil 1) sebanyak 59,20 persen diantaranya menerima setidaknya satu bansos dari Pemerintah Pusat. Di Perkotaan, sebanyak 24,14 persen rumah tangga dan di perdesaan sebanyak 61,92 persen rumah tangga menerima setidaknya 1 bansos dari pemerintah pusat. Pada gambar juga terlihat bahwa semakin rendah kelompok pengeluaran rumah tangga (kuantil) maka proporsi penerimaan bansosnya semakin tinggi dibandingkan dengan rumah tangga pada kelompok teratas. Struktur tersebut terjadi karena program bansos di masa pandemi COVID-19 ini memang menyasar kepada kelompok-kelompok rentan terutama pada kelompok 40 persen terbawah (kuantil 1 dan 2). Pola yang sama juga pada distribusi penerimaan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Bansos pemerintah daerah juga menyasar pada kelompok 40 persen terbawah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi penerimaaan bansos pada kuantil 1 dan 2.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Maluku Utara memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kesejahteraan penduduk yang diukur dari penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga. Wilayah perkotaan mengalami dampak yang luar biasa pada semua sektor lapangan usaha, pada status pekerja informal dan pada penduduk lansia. Di sisi lain, cakupan penerimaan bansos untuk penanganan COVID-19 lebih besar diterima rumah tangga di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Olah karena itu, pemberian bansos sebaiknya diprioritaskan pada wilayah perkotaan terutama pada kelompok penduduk 40 persen terbawah.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih bersifat deskriptif namun dapat dijadikan hipotesis untuk penelitian selanjutnya. Untuk menguji hipotesis ini dapat menggunakan metode parametrik dengan teknik pengujian dua sampel dependen. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode statistik inferensia dengan menjadikan variabel lapangan usaha, status pekerjaan, kelompok umur, penerimaan bantuan sosial dan variabel lainnya sebagai prediktor untuk memastikan apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap penurunan pengeluaran per kapita rumah tangga di Maluku Utara selama masa Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Adieotomo, S. M., & Pardede, E. L. (2021). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kondisi Sosial, Demografi, Kesehatan,dan Ekonomi Lansia*. Diambil kembali dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia: https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/08/06/ld-feb-ui-dan-fkp-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kondisi-sosial-demografi-kesehatan-dan-ekonomi-lansia/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Dipetik Agustus 22, 2021, dari https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021, Agustus 22). Dipetik Agustus 22, 2021, dari https://covid19.go.id/peta-sebaran

Badan Pusat Statistik. (2020a). *Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan I-2020.* Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara. Dipetik Agustus 22, 2021, dari https://malut.bps.go.id/pressrelease/2020/05/06/469/ekonomi-maluku-utara-triwulan-i-2020-tumbuh-3-06-persen--y-on-y---ekonomi-maluku-utara-triwulan-i-2020-turun-2-87-persen--q-to-q-.html

Badan Pusat Statistik. (2020b). *Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan II-2020.* Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara. Dipetik Agustus 22, 2021, dari https://malut.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/486/ekonomi-maluku-utara-triwulan-ii-2020-mengalami-kontraksi-sebesar-0-16-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2020c). *Profil Kemiskinan Maluku Utara September 2020.* Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara. Dipetik Agustus 22, 2021, dari https://malut.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/517/tingkat-kemiskinan-maluku-utara-september-2020-adalah-sebesar-6-97-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2020d). *Keadaan Ketenagakerjaan Maluku Utara Agustus 2020.* Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara. Dipetik Agustus 23, 2021, dari https://malut.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/501/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--maluku-utara-sebesar-5-15-persen.html

Badan Pusat Statistik. (2020e). *Buku 4 Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020f). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2020.* Ternate: BPS Provinsi Maluku Utara. Diambil kembali dari https://malut.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2020&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+kesejahteraan+rakyat&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan

Dewi, M. M., Magdalena, F., Ariska, N. P., Setiyawati, N., & Rumboirusi, W. C. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia. *Populasi*, 32-53.

Sarni, & Sidaya, M. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Pendapatan Petani Sayuran di Kota Ternate. *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis* (hal. 144-148). Ternate: Universitas Khairun.

Worldmeter. (2021, Agustus 22). *Covid-19 Coronavirus Pandemic*. Diambil kembali dari https://www.worldometers.info/coronavirus/